

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Website dan Sumber Lainnya

- Akbar, M. Fahdi F. (Tanpa Tahun). ANALISIS. Diakses pada 11 April 2022 melalui website https://www.academia.edu/32198657/ANALISIS_pdf
- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 54–74. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409>
- Biela, H.S., Anggraini, L.N., Aulia, N.S., & Madani, R. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah: Modul Bendahara. Diakses pada 13 April 2022 melalui website <https://pdfcoffee.com/kelompok-9-modulbendaharadocx-pdf-free.html>
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2021). *Aplikasi SAKTI Mendukung Reformasi Bidang Penganggaran*. Jakarta: Sekretarian Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Jakarta. (2022). *[INFO] Penonaktifan Sementara Menu-Menu pada Aplikasi SAKTI*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Jakarta. (2022). *[INFO] Penjadwalan akses menu Cetak LPJ Modul Bendahara Pengeluaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Jakarta. (2022). *[INFO] Penutupan Akses Menu Cetak LPJ SAKTI pada Tanggal 2 Februari 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Jakarta. (Tanpa Tahun). *KPPN Percontohan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Jakarta. (Tanpa Tahun). *Sejarah Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Majene. (2013). *Apa itu SAKTI???* Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.

- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Mataram. (2018). *MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI KUNCI SENTRAL PENGELOLAAN APBN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Purwokerto. (Tanpa Tahun). *Tugas dan Fungsi KPPN Purwokerto*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Tanjung. (2020). *Tugas Bendahara Pengeluaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.
- Ebta Setiawan. (2021). Pengertian Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan). Diakses pada 10 April 2022 melalui website <https://kbbi.web.id/analisis>
- Ebta Setiawan. (2021). Pengertian Terap-2 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan). Diakses pada 10 April 2022 melalui website <https://kbbi.web.id/terap-2>
- Hasanah, N., Sriyani. (2021). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Masa Pandemi COVID-19 pada KPPN Palembang. *Journal Publicuho*, 886-912.
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto. (2020). Laporan Kinerja KPPN Purwokerto. Hal. 1-53 Diakses pada 14 April 2022 melalui website https://drive.google.com/file/d/1stT9NWB_v5AniPEJUjAt_3jbwIEnJwuR/view
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan*. Jakarta: Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI. (Tanpa Tahun). *Petunjuk Teknis SAKTI Web*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- M. Reza F. Universitas Mercu Buana. (2019). Artikel Sistem Informasi Manajemen Implementasi Pengembangan Sistem Revolusi 4.0 Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Diakses pada 06 Desember 2021 melalui website https://www.researchgate.net/publication/336686443_ARTIKEL_SISTEM_INFORMASI_MANAJEMEN_PENGEMBANGAN_SISTEM_REVOLUSI_40_PT_TELKOM

Mr. Yap Kioe Sheng. UNESCAP. (Tanpa Tahun). *What is Good Governance?*. Diakses pada 06 Desember 2021 melalui website <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>

Mukhtaromin. (2018). Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 588-602.

Nugroho, H. P., & Lestyowati, J. (2020). Analisis Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna Aplikasi SAKTI dengan PIECES Framework. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 93–104. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.188>

Ramadhani. (2020). Analisis Komunikasi Organisasi di UPT. *Perpustakaan UIN Ar-Raniry*. Skripsi, 18-19.

Rentika, I. (2017). Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 21.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 81-95.

Widiyanita, N. (2018). Penerapan Media Video untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi Bencana Gunung Berapi Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 2 Colomadu Karanganyar. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 13.

Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 39/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Bendahara SAKTI.

- Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Kementerian Keuangan RI. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kementerian Keuangan RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan